

The Role Of Smart Sustainable City Implementation On Government Performance With E-Government As Mediation

Peranimplementasi Smart Sustainable City Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan E-Government Sebagai Pemediasi

Cut Muthia Kesuma Hayati¹, Asniati Bahari^{2*}

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas^{1,2}

cutmuthia16@gmail.com¹, asniati@eb.unand.ac.id²

**Coresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of smart sustainable city implementation on government performance in Padang City, mediated by e-government. This study uses a quantitative method by conducting a survey through the distribution of questionnaires. This study also uses secondary data obtained through LAKIP from 2020 to 2024. The population of this study was 52 OPDs in Padang City. The sample size in this study was 152 respondents. The sampling technique was non-probability sampling, namely accidental sampling. The data analysis technique in this study was linear regression analysis. The results of this study contribute to providing empirical evidence regarding the implementation of smart sustainable cities on government performance in Padang City with e-government as a mediator. The results of this study show that the role of smart sustainable city implementation has a significant effect on government performance directly and also indirectly through e-government as a mediator. E-government is a major component in the influence of smart sustainable city implementation on government performance. Its impact strengthens government legitimacy, increases public trust in the government, and encourages community participation.

Keywords: Government Performance, Smart Sustainable City, E-government

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah di Kota Padang dengan dimediasi oleh e-government. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui LAKIP dari tahun 2020-2024. Populasi penelitian ini adalah 52 OPD di Kota Padang. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 152 responden. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling yaitu menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linear. Hasil penelitian ini berkontribusi memberikan bukti empiris terkait implementasi smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah di Kota Padang dengan e-government sebagai pemediasi. Hasil penelitian menunjukkan peran implementasi smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah secara langsung dan juga secara tidak langsung melalui e-government sebagai pemediasi. E-government menjadi komponen utama dalam pengaruh implementasi smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah. Dampaknya memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah, Smart Sustainable City, E-government

1. Pendahuluan

Kota memiliki peranan penting dalam suatu negara karena menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Seiring waktu, terjadi pergeseran populasi dari wilayah pedesaan dan semi-perkotaan menuju daerah perkotaan. Akibatnya, diperlukan percepatan dalam pengembangan layanan publik, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data dari PBB pada tahun 2018 mencatat bahwa 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Kondisi tersebut

menyebabkan tingginya konsumsi sumber daya dan energi, serta menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan perkotaan seperti adanya polusi, pengangguran, dan kepadatan penduduk. Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah menerapkan konsep smart sustainable city.

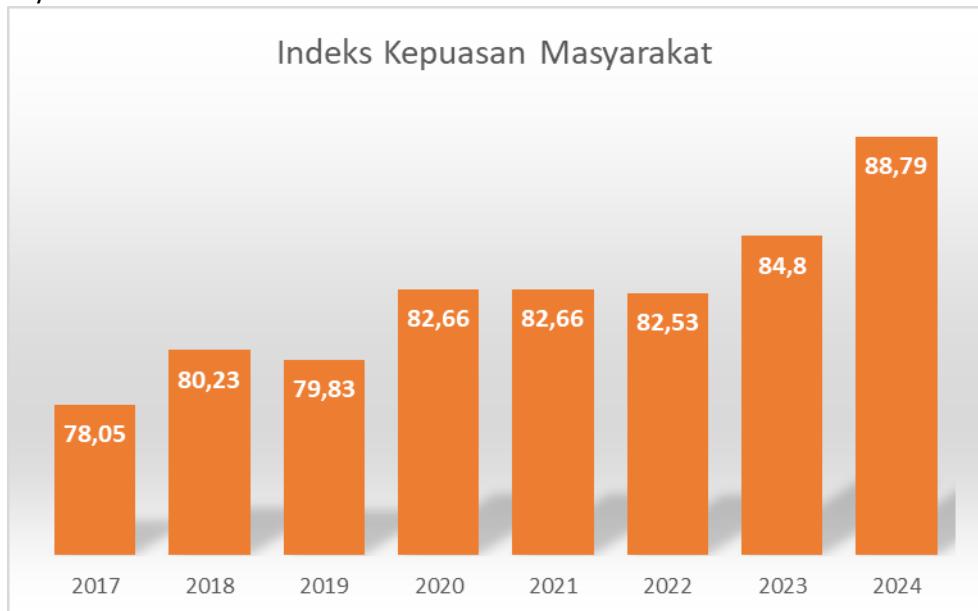
Saat ini, hampir seluruh kota di dunia berlomba-lomba menerapkan konsep smart sustainable city, termasuk kota-kota di Indonesia. Di Indonesia, penerapan smart city pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 melalui program "Gerakan Menuju 100 Smart City" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan sebagai ajang seleksi dan kompetisi antar kota atau daerah di Indonesia. Kota atau daerah yang terpilih akan memperoleh pendampingan dalam merancang pembangunan smart city selama lima hingga sepuluh tahun ke depan. Pada tahap pertama tahun 2017, terpilih 25 kota/daerah sebagai smart city. Tahap kedua pada tahun 2018 menetapkan 50 kota/daerah, dan pada tahap ketiga tahun 2019 25 kota/daerah sisanya juga terpilih (Herdiyanti et al., 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart sustainable city di Indonesia berkembang pesat. Purba & Jayadi (2023) mengkaji implementasi smart city di Jakarta dan menemukan keberhasilan dalam aspek konektivitas dan TIK. Di Kota Makassar, menurut Nurdyassa et al. (2021), teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi layanan di era Industri 4.0. Sementara di Sumatera Selatan, Hasmawaty et al. (2022) menemukan integrasi green IT dengan smart city dalam penyediaan layanan ramah lingkungan. Di Surabaya, menurut Amalia et al. (2023), keberhasilan smart city didukung oleh masyarakat yang melek teknologi, dengan pencapaian signifikan dalam layanan publik dan ekonomi kreatif. Pramesti et al. (2020) menambahkan bahwa Surabaya unggul dibandingkan Malang dalam aspek smart people karena keaktifan komunitas yang inovatif. Di Kota Cilegon, Wahyuningsih et al. (2024) melaporkan bahwa 84 dari 117 program *smart city* telah terealisasi pada tahun 2022, dengan dukungan kebijakan Walikota dan alokasi anggaran dari APBD. TIK dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi layanan pemerintahan.

Penerapan smart city di Kota Padang dimulai pada tahun 2018 melalui program "Gerakan Menuju 100 Smart City" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Ditjen Aptika, 2021). Pada tahun 2022 Kota Padang menerima piagam penghargaan dalam kategori smart society. Kota-kota lain di Indonesia juga telah mendapatkan piagam penghargaan seperti Bandung dengan smart governance-nya, Surakarta dengan smart branding-nya, Semarang dengan smart economy-nya, Yogyakarta dengan smart society, Kabupaten Demak dengan smart living, Kota Madiun dengan smart environment, dan Wonogiri dengan smart tourism (Bahari et al., 2024). Dalam gerakan menuju smart city pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City dan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang Nomor 247 Tahun 2018 tentang Dewan Kota Pintar.

Program smart city di Kota Padang memiliki enam pilar yang terdiri dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment (Tribun Padang, 2024). Menurut Marizka (2020) salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan keenam pilar dari smart city adalah dengan membangun command center (ruang pusat kendali) untuk mempermudah monitoring dan kontrol. Command center menyediakan informasi, aplikasi dan pemantauan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi di pemerintah daerah. Tujuan dari command center adalah untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan agar dapat memantau berbagai kejadian dan kesadaran situasional secara cepat dan efektif. Saat ini pemerintah Kota Padang telah resmi membuka Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mempercepat terancangnya master plan dari program smart city Kota Padang.

Penerapan program smart city secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah kota. Di Kota Padang, indikator keberhasilan bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, perbaikan kualitas hidup, serta pengelolaan kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Karena keberhasilan ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, anggaran yang memadai, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Artinya keberhasilan smart city diukur berdasarkan kualitas pelayanan publik (Anisa & Hidayat, 2023). Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Padang meningkat dari sebelum dan setelah diterapkannya smart city pada gambar 1. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah Kota Padang setelah diterapkannya program smart city. Pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang mendasari terwujudnya smart city.



Gambar 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: LAKIP Tahun 2018-2024

Kinerja pemerintah dapat meningkat seiring dengan seberapa efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya (P. Kim & Im, 2019). Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan publik, serta transparan dalam membuat kebijakan dan adanya demokrasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Lim et al (2024) persepsi mengenai transparansi pemerintah dan demokrasi secara umum lebih tinggi di kota pintar (smart city) dibandingkan kota non-pintar.

Pemerintah dengan tata kelola yang cerdas (smart governance) pada saat ini menjadi hal terpenting dalam proses peningkatan kualitas dari pemerintah itu sendiri. Terlebih lagi semakin kritisnya masyarakat dalam menanggapi berbagai informasi yang mereka terima dan usaha-usaha mereka untuk memperoleh informasi yang transaparan (Andini et al., 2023). Smart city merupakan upaya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang tepat, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dimensi dari smart city yaitu smart governance menjadi kunci dimana pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan prinsip hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Guret et al., 2024).

Implementasi e-government membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. E-

government dapat membantu mendorong adanya transparansi atau keterbukaan informasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hashim, 2024). E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta cabang pemerintahan lainnya (Sun et al., 2015). Melalui penggunaan teknologi pemerintah menyediakan layanan seperti pembayaran pajak, pendaftaran bisnis, dan layanan kesehatan, yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan warga negara (Abdussamad et al., 2024). Menurut Supratiwi et al (2019) implementasi e-government erat kaitannya dengan peningkatan kinerja pemerintah. Semakin baik implementasi e-government akan semakin meningkat pula kinerja pemerintah.

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara empiris implementasi kebijakan e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelayanan publik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan e-government dinilai lebih baik dan mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Kuswati et al., 2022). Pemerintah diseluruh dunia telah mengembangkan layanan e-government yang diharapkan dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi dan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada penggunanya, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu, e-government juga berkontribusi pada penghematan biaya operasional bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan mengurangi kebutuhan untuk proses manual, e-government membantu menurunkan biaya administrasi dan mempercepat waktu pelayanan (Abdussamad et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris terkait peran implementasi smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah di Kota Padang dengan e-government sebagai pemediasi hubungan keduanya. Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai implementasi smart city di kota lain di Indonesia. Di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia masih sedikit penelitian yang membahas mengenai adopsi smart sustainable city dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini membantu mengeksplorasi hubungan smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah melalui penerapan e-government.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada konsep perjanjian sosial antara entitas dan masyarakat secara luas, di mana entitas dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dan norma sosial yang berlaku saat entitas beroperasi (Mio et al., 2020). Menurut Mousa & Hassan (2015), teori legitimasi merupakan suatu kondisi ketika sistem nilai sebuah entitas sesuai dengan sistem nilai sosial di mana entitas tersebut menjadi bagiannya. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan entitas bergantung pada kemampuan entitas menyampaikan tujuan yang diinginkan untuk mendistribusikan manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat (Pratama & Deviyanti, 2022).

Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk menjelaskan praktik pengungkapan informasi lingkungan dan sosial (Mousa & Hassan, 2015), serta pelaporan keberlanjutan (Silva, 2021; Zhang et al., 2024). Teori legitimasi telah lama diterapkan dan diyakini akan terus relevan untuk menjelaskan alasan entitas melakukan pelaporan atas kinerja sosial dan lingkungannya (Silva, 2021).

Smart City

Smart city adalah multi-dimensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang digabungkan dan diintegrasikan dengan menggunakan teknologi untuk menangani permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup (Ruhlandt, 2018). Tujuan dari smart city adalah untuk mereformasi dari kota biasa menjadi kota yang maju secara teknis (Shamsuzzoha et al., 2021). Sebuah kota disebut sebagai smart city apabila kota tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi, menyebarkan informasi kepada masyarakat, dan meningkatkan standar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Hashim, 2024).

Smart city harus mampu memberikan solusi yang efisien terhadap permasalahan perkotaan, seperti konsumsi energi yang berlebihan, perlindungan terhadap lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Konsep tersebut telah diterapkan di berbagai belahan dunia (Kusumastuti et al., 2022). Dengan bantuan teknologi, smart city berkembang untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat secara umum (Hashim, 2024). Menurut Giffinger et al (2007) terdapat enam dimensi dari smart city sebagai dasar dari penerapan smart city yaitu smart economy, smart governance, smart environment, smart living, smart mobility, dan smart people.

Smart Sustainable City

Sebuah kota bisa berkelanjutan tanpa kecerdasan, namun itu sama halnya dengan "kota" saja bukan "kota pintar" (Macke et al., 2019). Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan smart city memunculkan konsep baru yaitu "smart sustainable city" (Huovila et al., 2019). Smart sustainable city adalah kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional dan pelayanan perkotaan, dan daya saing, sekaligus memastikan bahwa hal tersebut memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan sehubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Akande et al., 2019).

Smart sustainable city diukur berdasarkan konsep keberlanjutan yang terdiri dari smart economy, smart social, dan smart environment (Akande et al., 2019; Wey & Peng, 2021; Karal & Soyer, 2024; Kim et al., 2024). Smart economy adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasi bisnis, status pembangunan ekonomi. Smart social adalah konsep yang berpusat pada masyarakat, inklusi sosial dan pendidikan, yang dinilai dari dampak perkembangan TIK terhadap budaya dan nilai-nilai sosial, serta penerimaan publik dan kekuasaan masyarakat. Smart environment adalah penerapan TIK untuk memantau sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (Lai & Cole, 2023).

E-government

E-government adalah praktik penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintah untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, perusahaan, dan cabang pemerintahan lainnya (Hashim, 2024). Tujuan utama dari e-government adalah untuk secara progresif mengubah cara kerja pemerintah, tidak hanya mengkomputerisasikan kantor-kantor pemerintah, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi dan kualitas layanan terhadap masyarakat (Multama et al., 2019). Menurut Dhaoui (2022) konsep e-government berfokus pada fitur interaksi antara faktor ekonomi, politik, dan sosial karena memungkinkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan lainnya bekerja lebih efisien. Untuk itu, terdapat 4 komponen utama e-government yaitu Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G), dan Government to Employee (G2E).

Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya (Angelina et al., 2024). Kinerja pemerintah merujuk pada seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya (Kim & Im., 2019). Hal ini tercantum dalam rencana kerja, rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari sebuah kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah daerah dapat dicapai melalui standar pelayanan minimal dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sunardi et al., 2022). Kinerja merupakan tingkat pencapaian kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi suatu pemerintahan sesuai rencana strategisnya.

Hipotesis dan Kerangka Penelitian

Boz & Cay (2024) melakukan penelitian yang mengkaji tingkat antusiasme pemerintah daerah untuk menjadi kota pintar dan mempertahankan layanan kota yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik utama dari smart city. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki populasi lebih rendah dibandingkan kota metropolitan besar seperti Istanbul dan Ankara lebih antusias dan berhasil memberikan layanan bagi warganya yang dapat dikaitkan dengan konsep smart city. Smart city memberikan sarana komunikasi antara masyarakat kota dan pemerintah kota untuk mencapai smart sustainable city (Hashim, 2024).

H1: Smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

E-government memerlukan hubungan antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan smart city. Pentingnya e-government untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan (Hashim, 2024). Kolaborasi semakin dianggap penting untuk transformasi digital di sektor publik. Transformasi layanan dan operasi internal melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sering kali memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan di luar lembaga pemerintah. Hal ini penting khususnya dalam inisiatif pengembangan smart city, yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi guna mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan yang kompleks di wilayah hukum setempat (Buyannemekh et al., 2023). Lingkungan ekonomi memainkan peran penting dalam pengembangan e-government (Ma & Zheng, 2018).

H2a: Smart economy berpengaruh signifikan terhadap e-government

H2b: Smart social berpengaruh signifikan terhadap e-government

H2c: Smart environment berpengaruh signifikan terhadap e-government

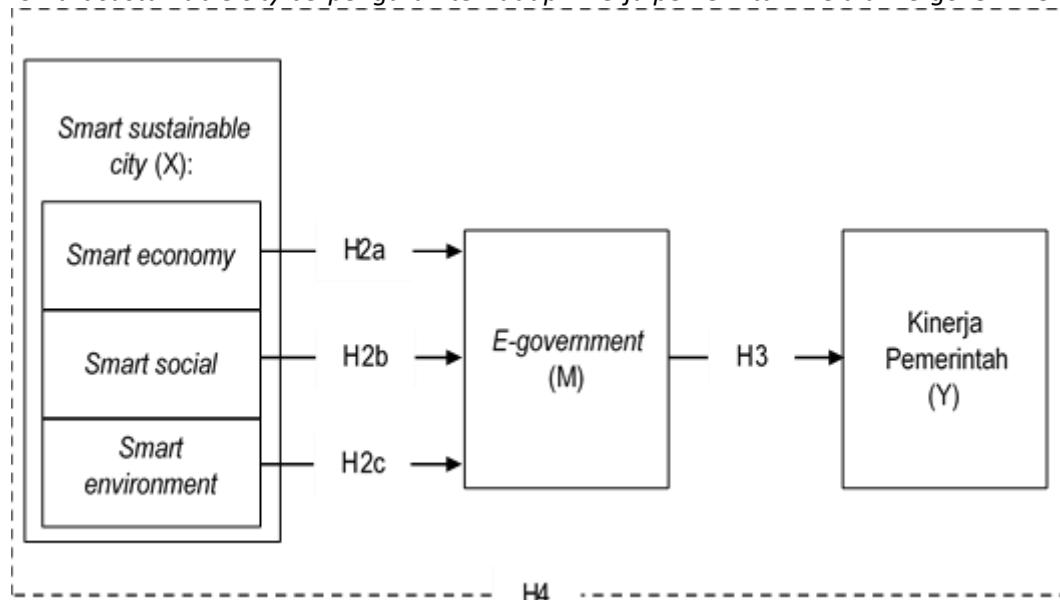
Penerapan e-government dapat meningkatkan kinerja pemerintah seperti peningkatan pelayanan publik, efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatkan akuntabilitas. Implementasi e-government mengarah pada perbaikan tata kelola (Supratiwi et al., 2019). Penelitian terdahulu meneliti pengaruh implementasi e-government terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sektor publik (Nawafleh, 2020). Selain itu, Amosun et al (2022) meneliti pengaruh penggunaan e-government terhadap reputasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, transparansi pemerintah, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan e-government terhadap kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya (Supratiwi et al., 2019). Hasil penelitian Sutopo et al

(2017) menunjukkan bahwa e-government memiliki hubungan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H3: E-government berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

Smart city akan menciptakan lingkungan di mana pemerintah dapat terlibat dan berkolaborasi melalui platform digital. Sehingga akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah sangat penting karena sangat mempengaruhi legitimasi pemerintah dan kesediaan masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah dan mendorong inisiatif masyarakat (Zhang et al., 2022). Jameel et al (2019) menggunakan e-government sebagai variabel mediasi pada hubungan antara good governance dan kepercayaan publik. Lee et al (2018) menggunakan e-government sebagai variabel mediasi pada hubungan tata kelola pemerintah dan peraturan pemerintah terhadap korupsi pemerintah. Menurut Sari et al (2020) kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Kota Surabaya merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government. Dengan adanya inovasi daerah ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

H4: Smart sustainable city berpengaruh terhadap kinerja pemerintah melalui -e-government



Gambar 2. Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana kinerja pemerintah Kota Padang terhadap implementasi smart sustainable city melalui e-government sebagai pemediasi hubungan keduanya. Objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang. Sehingga unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 52 OPD di Kota Padang. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 2.706 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan accidental sampling yang termasuk ke dalam non probability sampling. Menurut Hair et al (2017) penentuan jumlah sampel dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah variabel dengan 15-20. Berdasarkan pedoman tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $5 \times (15-20) = 75-100$. Sehingga minimal jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarluaskan langsung kepada

responden. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari masing-masing OPD. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah (Y), variabel independennya yaitu smart sustainable city, dan e-government sebagai variabel mediasi. Berikut indikator pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Operasional Variabel

| No | Nama Variabel | Definisi | Indikator |
|----|------------------------|--|--|
| 1. | Smart Sustainable City | Kota inovatif yang menggunakan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan sehubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Akande et al., 2019) | 1. Smart Economy (inovasi, kewirausahaan, produktifitas, infrastruktur fisik) 2. Smart Social (pendidikan, kesehatan, keamanan, budaya, keanekaragamanan dan kohesi sosial) 3. Smart Environment (kualitas udara, kualitas air, kebisingan, kualitas lingkungan) |
| 2. | E-government | Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan teknologi informasi (TI) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hashim, 2024) | 1. Kemudahan penggunaan 2. Kepercayaan 3. Keandalan 4. Ketersediaan informasi 5. Dukungan masyarakat |
| 3. | Kinerja Pemerintah | Seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Angelina et al., 2024) | 1. LAKIP masing-masing OPD tahun 2024 |

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Responden

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah responden laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yaitu masing-masing 77 orang laki-laki dan 75 orang perempuan. Berdasarkan umur mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, yaitu 31–40 tahun sebanyak 64 orang dan 41–50 tahun sebanyak 61 orang. Responden berusia di bawah 30 tahun berjumlah 15 orang, sedangkan yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 12 orang. Tingkat pendidikan terakhir responden menunjukkan mayoritas lulusan D4/S1 sebanyak 74 orang dan S2 sebanyak 43 orang. Responden dengan pendidikan SMA berjumlah 20 orang, D3 berjumlah 14 orang, dan hanya 1 orang yang berpendidikan S3. Berdasarkan jabatan, sebagian besar responden menduduki jabatan fungsional sebanyak 79 orang, diikuti oleh jabatan struktural sebanyak 51 orang dan pelaksana sebanyak 22 orang. Data ini menggambarkan bahwa responden penelitian didominasi oleh pegawai pada usia produktif dengan pendidikan tinggi serta mayoritas berada pada jabatan fungsional.

Tabel 2. Gambaran Umum Responden

| Karakteristik | Keterangan | Jumlah |
|---------------|------------|--------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 77 |
| | Perempuan | 75 |

| | | |
|---------------------|------------|----|
| Umur | <30 | 15 |
| | 31-40 | 64 |
| | 41-50 | 61 |
| | >50 | 12 |
| Pendidikan Terakhir | SMA | 20 |
| | D3 | 14 |
| | D4/S1 | 74 |
| | S2 | 43 |
| | S3 | 1 |
| Jabatan | Struktural | 51 |
| | Fungsional | 79 |
| | Pelaksana | 22 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa variabel smart economy memperoleh nilai minimum sebesar 3,1, nilai maksimum sebesar 5, dengan nilai mean sebesar 4,29, dan standar deviasi sebesar 0,44. Smart social mempunyai nilai minimum sebesar 2,88, nilai maksimum sebesar 5, dengan mean sebesar 3,96, dan standar deviasi sebesar 0,58. Smart environment memperoleh nilai minimum sebesar 3,63, nilai maksimum sebesar 5, dengan mean sebesar 4,23, dan standar deviasi sebesar 0,44. E-government memperoleh nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 3 dan 5, dengan mean sebesar 4,37, dan standar deviasi sebesar 0,36. Variabel kinerja pemerintah dengan menggunakan data LAKIP memperoleh nilai minimum sebesar 3,4, nilai maksimum sebesar 5, dengan mean sebesar 4,49, dan standar deviasi sebesar 0,44. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki rentang nilai 3 hingga 5 (skala likert 1-5). Semua variabel menunjukkan implementasi atau persepsi yang cukup baik, meskipun masih terdapat variasi antar persepsi responden.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

| Variabel | N | Mean | Std. Dev | Min | Max |
|--------------------|-----|--------|----------|-----|-----|
| Smart Economy | 152 | 42,947 | 4,359 | 31 | 50 |
| Smart Social | 152 | 31,644 | 4,664 | 23 | 40 |
| Smart Environment | 152 | 33,868 | 3,514 | 29 | 40 |
| E-government | 152 | 43,736 | 3,638 | 30 | 50 |
| Kinerja Pemerintah | 152 | 22,427 | 2,224 | 17 | 25 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Normalitas Data

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai Prob > z adalah sebesar 0,282 dimana nilai tersebut >0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Shapiro-wilk tes for normal data

| Variabel | N | Prob>z |
|---------------|-----|--------|
| Data residual | 152 | 0,282 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai tolerance seluruh variabel >0,10 dan nilai VIF <10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Colinearity Statistic | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| | VIF | Tolerance |
| Smart Economy | 1,74 | 0,574 |
| Smart Social | 1,72 | 0,582 |
| Smart Environment | 1,49 | 0,672 |
| E-government | 1,06 | 0,939 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan pada Tabel 6, menunjukkan nilai Prob > chi2 lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,056. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel independen terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Breusch-pagan/Cook-weisberg test for heteroskedasticity | | |
|--|----------|---------------------|
| Variabel | N | Prob>chi2 |
| Data residual | 152 | 0,056 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan tabel 7, nilai R Square sebesar 0,3273, hal ini menunjukkan bahwa variabel smart economy, smart social, smart environment mampu menjelaskan variabel kinerja pemerintah pada OPD Kota Padang sebesar 32,73% sedangkan sisanya sebesar 67,27% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Sementara itu, variabel smart economy, smart social, smart environment mampu menjelaskan variabel e-government sebesar 0,4267 atau 42,67% sedangkan sisanya sebesar 57,33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinan

| Variabel | R-squared | Adj R-squared |
|--------------------|------------------|----------------------|
| E-government | 0,3273 | 0,3136 |
| Kinerja Pemerintah | 0,4267 | 0,4151 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa smart economy memiliki nilai Prob > t sebesar 0,000, nilai tersebut menunjukkan <0,05. Smart social memiliki nilai Prob > t sebesar 0,000 atau <0,05. Smart environment memiliki nilai Prob > t sebesar 0,000 atau <0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel smart economy, smart social, smart environment berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah.

Smart economy memiliki nilai Prob > t adalah sebesar 0,000 atau <0,05. Smart social memiliki nilai Prob > t sebesar 0,021 atau <0,05. Smart environment memiliki nilai Prob > t sebesar 0,002 atau <0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel smart economy, smart social, smart environment berpengaruh signifikan terhadap variabel e-government.

Table 8. Hasil Uji Hipotesis

| Model | Coefficient | Std. Eror | t | Prob>t |
|---|--------------------|------------------|----------|------------------|
| Smart economy terhadap Kinerja Pemerintah | 0,235 | 0,039 | 5,91 | 0,000 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| <i>Smart social</i> terhadap Kinerja Pemerintah | -0,229 | 0,300 | -7,63 | 0,000 |
| <i>Smart environment</i> terhadap Kinerja Pemerintah | -0,408 | 0,050 | -8,17 | 0,000 |
| <i>Smart economy</i> terhadap <i>E-government</i> | 0,275 | 0,070 | 3,80 | 0,000 |
| <i>Smart social</i> terhadap <i>E-government</i> | -0,124 | 0,053 | -2,34 | 0,021 |
| <i>Smart environment</i> terhadap <i>E-government</i> | 0,274 | 0,088 | 3,10 | 0,002 |
| <i>Smart economy</i> terhadap Kinerja Pemerintah dimediasi oleh <i>E-government</i> | 0,180 | 0,039 | 4,60 | 0,000 |
| <i>Smart Social</i> terhadap Kinerja Pemerintah dimediasi oleh <i>E-government</i> | -0,204 | 0,028 | -7,11 | 0,000 |
| <i>Smart environment</i> terhadap Kinerja Pemerintah dimediasi oleh <i>E-government</i> | -0,463 | 0,048 | -9,56 | 0,000 |
| <i>E-government</i> terhadap Kinerja Pemerintah dengan mengendalikan <i>Smart sustainable city</i> | 0,199 | 0,043 | 4,57 | 0,000 |

Sumber: Data diolah, 2025

Uji Efek Mediasi

Uji sobel dilakukan untuk menguji hipotesis 4 yaitu peran *e-government* dalam memediasi pengaruh *smart sustainable city* terhadap kinerja pemerintah. Uji sobel untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel mediasi mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai p-value <0,05 maka dapat disimpulkan mediasi signifikan. Berdasarkan tabel 9, dapat disimpulkan bahwa *smart economy* memperoleh nilai P-value sebesar 0,003, *smart social* sebesar 0,040, dan *smart environment* sebesar 0,012. Maka dapat disimpulkan bahwa *smart economy*, *smart social*, dan *smart environment* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dengan dimediasi oleh *e-government*.

Tabel 9. Hasil Uji Sobel

| Variabel | Z hitung | Std. Eror | P-value | Keterangan |
|--------------------------|----------|-----------|---------|--------------------|
| <i>Smart economy</i> | 2,907 | 0,018 | 0,003 | Mediasi signifikan |
| <i>Smart social</i> | -2,052 | 0,012 | 0,040 | Mediasi signifikan |
| <i>Smart environment</i> | 2,509 | 0,021 | 0,012 | Mediasi signifikan |

Sumber: Data diolah, 2025

Pembahasan

Pengaruh Smart sustainable city terhadap Kinerja Pemerintah

Smart economy, smart social, smart environment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Implementasi smart sustainable city yang mengintegrasikan teknologi informasi, memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Smart sustainable city juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, sehingga proses pengambilan

keputusan lebih berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah mampu merencanakan program secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi publik. Seluruh aspek ini secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah, baik dari sisi kualitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi, karena pengembangan smart sustainable city dapat menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat legitimasinya di mata masyarakat. Implementasi smart sustainable city menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan layanan publik seperti transportasi umum, kesehatan, dan administrasi. Ketika pemerintah mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien serta responsif, maka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan meningkat. Jadi, secara keseluruhan, implementasi smart sustainable city bukan hanya tentang adopsi teknologi digital, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, kepercayaan publik, serta partisipasi masyarakat. Semuanya berkontribusi menguatkan legitimasi pemerintah bagi masyarakat.

Boz & Cay (2024) melakukan penelitian yang mengkaji tingkat antusiasme pemerintah daerah di Turki untuk menjadi kota pintar dan mempertahankan layanan kota yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik utama dari smart city. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki populasi lebih rendah dibandingkan kota metropolitan besar seperti Istanbul dan Ankara lebih antusias dan berhasil memberikan layanan bagi warganya yang dapat dikaitkan dengan konsep smart city. Hasil penelitian Izzuddin (2022) menunjukkan bahwa implementasi smart city dinilai sebagai sebuah performa yang baik bagi sebuah kota karena dapat memberikan dampak positif bagi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat di segala bidang. Dalam hal ini, segala bentuk aktivitas akan bergerak ke arah digitalisasi untuk mempermudah pelayanan publik. Hasil penelitian ini didukung oleh Marizka (2020) pemerintah Kota Padang telah siap menuju smart city dengan telah dibangunnya command center untuk mempermudah monitoring dan controling.

Pengaruh Smart sustainable city terhadap E-government

Smart economy, smart social, smart environment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap e-government. E-government merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan smart sustainable city. Konsep smart sustainable city menekankan pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sementara e-government menyediakan infrastruktur dan sistem layanan publik berbasis digital yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Melalui e-government, layanan pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga pengaduan publik. Integrasi e-government dalam smart city juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif sehingga keputusan dan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, e-government berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan terwujudnya pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan partisipatif dalam kerangka smart city.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hashim (2024) menunjukkan bahwa e-government memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi smart city di Arab Saudi. E-government memainkan peran penting dalam mewujudkan smart city. E-government berperan sebagai pendukung sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian oleh Lytras & Šerban (2020) menekankan bahwa e-government penting sebagai komponen utama dalam implementasi dan pengembangan smart city. E-government dan smart city keduanya saling mendukung. Hasil

penelitian Andini et al (2023) menunjukkan bahwa implementasi strategi e-government dalam mewujudkan smart governance di Kota Tangerang. Implementasi e-government di Kota Tangerang menunjukkan hasil yang baik dalam mewujudkan smart governance. Hal ini didukung dengan berbagai program dan inovasi yang dijalankan pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam hal pelayanan publik.

Pengaruh E-government terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa e-government berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Melalui penerapan e-government, proses administrasi pemerintahan yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem digital ini juga mempermudah pengelolaan data, koordinasi antarinstansi, serta pemantauan kinerja aparatur sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat dirancang dan dieksekusi lebih tepat sasaran. Dengan meningkatnya kemudahan layanan dan transparansi, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah juga bertambah. Semua aspek ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah baik dari segi produktivitas, akuntabilitas, maupun kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi, karena e-government merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan legitimasinya di mata masyarakat. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah dan cepat, seperti data anggaran, kebijakan publik, dan laporan kinerja pemerintah itu sendiri. Keterbukaan infomasi ini secara langsung mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat dapat melihat bagaimana keputusan dibuat dan dana digunakan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan memperkuat legitimasi pemerintah. Semakin baik komunikasi yang terjalin antar masyarakat dan pemerintah, maka akan semakin meningkatkan reputasi dan citra pemerintah dalam sudut pandang masyarakat kota (Crossley et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo et al (2017) menunjukkan bahwa e-government memiliki hubungan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Supratiwi et al (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan e-government terhadap kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Menurut Supratiwi et al (2019) penerapan e-government dapat meningkatkan kinerja pemerintah seperti peningkatan pelayanan publik, efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan akuntabilitas. Implementasi e-government mengarah pada perbaikan tata kelola. Sun et al (2015) menyatakan bahwa penggunaan e-government dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya bagi pemerintah, serta meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan Selain itu, Amosun et al., (2022) meneliti pengaruh penggunaan e-government terhadap reputasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, transparansi pemerintah, dan keterlibatan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan e-government memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kepercayaan pada pemerintah dan transparansi pemerintah.

Peran E-government dalam Memediasi Pengaruh Smart sustainable city terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil uji sobel menunjukkan bahwa e-government mampu memediasi pengaruh smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah. Smart sustainable city dan e-government merupakan satu kesatuan sistem pelayanan publik yang modern. Keduanya berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah baik dari segi efektivitas maupun efisiensi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi, karena implementasi smart sustainable city merupakan kerangka strategis pemerintah dengan e-government sebagai komponen utamanya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Implementasi smart sustainable city dan e-government merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan legitimasinya terhadap masyarakat. Kepercayaan kepada pemerintah sangat penting karena sangat mempengaruhi legitimasi pemerintah dan kesediaan masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah dan mendorong inisiatif masyarakat (Zhang et al., 2022).

Menurut Izzuddin (2022) penerapan smart city membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. E-government mendorong interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan platform untuk komunikasi, umpan balik, dan kritikan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dengan otoritas pemerintah, mencari informasi, dan menyampaikan kekhawatiran atau saran mereka. E-government memerlukan hubungan antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan smart city. Pentingnya e-government untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan (Hashim, 2024). Penerapan smart city masih bergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat kota dalam mengelola dan mengembangkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2020) kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Kota Surabaya merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government. Dengan adanya inovasi daerah ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

5. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi smart sustainable city terhadap kinerja pemerintah di Kota Padang dengan e-government sebagai pemediasi. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 152 responden. Objek pada penelitian ini adalah 52 OPD di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, smart economy, smart social, smart environment secara parsial berpengaruh signifikan terhadap e-government, e-government berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, smart sustainable city berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah melalui e-government.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya mempertimbangkan implementasi smart city untuk tujuan menjadikan kota yang berkelanjutan dan cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan e-government yang dapat berkontribusi meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Rekomendasi

Adapun keterbatasan penelitian dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan yaitu penelitian ini hanya meneliti satu variabel pemediasi yaitu e-government. Adanya kecenderungan responden untuk memberikan evaluasi yang lebih positif yang dapat mengakibatkan hasil penilaian yang tidak sepenuhnya objektif. Dapat dilihat dari hasil data kuesioner yang menunjukkan bahwa cukup banyak responden mengisi kuesioner dengan poin tertinggi terhadap semua indikator pertanyaan. Penggunaan data primer pada penelitian ini dapat menimbulkan kurangnya objektivitas karena terdapat perbedaan persepsi dari peneliti dan para responden yang mengisi kuesioner dalam pengumpulan data.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, direkomendasikan untuk menambah variabel pemediasi lainnya sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi perantara

pengaruh Smart sustainable city terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan hasil uji R square sebanyak 67,27% terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model untuk menjelaskan variabel kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Sebanyak 57,33% dipengaruhi oleh variabel lain untuk menjelaskan variabel e-government sebagai pemediasi. Artinya, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). E-Government di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.111>
- Akande, A., Cabral, P., Gomes, P., & Casteleyn, S. (2019). The Lisbon ranking for smart sustainable cities in Europe. *Sustainable Cities and Society*, 44(October 2018), 475–487. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.009>
- Amosun, T. S., Chu, J., Rufai, O. H., Muhideen, S., Shahani, R., & Gonlepa, M. K. (2022). Does e-government help shape citizens' engagement during the COVID-19 crisis? A study of mediational effects of how citizens perceive the government. *Online Information Review*, 46(5), 846–866. <https://doi.org/10.1108/OIR-10-2020-0478>
- Andini, F. S., Suherman, A., & Utami, P. (2023). Implementasi Strategi Electronic Government Dalam Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Di Kota Tangerang. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 1412–1482.
- Angelina, J., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2024). *The influence of audit opinion, characteristics of regional head, and levels of corruption on performance of local government in Indonesia*. 3(2), 96–112. <https://doi.org/10.58784/cfabr.160>
- Anisa, C. F., & Hidayat, B. (2023). Penerapan Smart City Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kota Magelang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 54–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.241>
- Boz, Y., & Cay, T. (2024). How smart and sustainable are the cities in Turkiye? - National policies and the enthusiasm level of the local governments. *Helijon*, 10(4), e26002. <https://doi.org/10.1016/j.helijon.2024.e26002>
- Buyannemekh, B., Gil-Garcia, J. R., & Gascó-Hernández, M. (2023). Exploring emergent collaborations for digital transformation in local governments: The engagement of public libraries in the development of smart cities. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/09520767231197600>
- Crossley, R. M., Elmagrhi, M. H., & Ntim, C. G. (2021). Sustainability and legitimacy theory: The case of sustainable social and environmental practices of small and medium-sized enterprises. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3740–3762. <https://doi.org/10.1002/bse.2837>
- Dhaoui, I. (2022). E-Government for Sustainable Development: Evidence from MENA Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(3), 2070–2099. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00791-0>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. *Centre of Regional Science, Vienna UT, October*.
- Guret, R., Albaar, M. R., & Samad, A. (2024). Smart City Planning to Create Good and Clean Government in Ternate City. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer & Informatika*, 7(2), 90–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v7i2.267>
- Hashim, H. (2024). E-government impact on developing smart cities initiative in Saudi Arabia: Opportunities & challenges. *Alexandria Engineering Journal*, 96(April), 124–131. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.04.008>
- Huovila, A., Bosch, P., & Airaksinen, M. (2019). Comparative analysis of standardized indicators

- for Smart sustainable cities: What indicators and standards to use and when? *Cities*, 89(January), 141–153. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.029>
- Izzuddin, F. N. (2022). Konsep Smart City Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 376–382. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.96>
- Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good governance and public trust: Assessing the mediating effect of E-government in Pakistan. *Lex Localis*, 17(2), 299–320. [https://doi.org/10.4335/17.2.299-320\(2019\)](https://doi.org/10.4335/17.2.299-320(2019))
- Karal, F. S., & Soyer, A. (2024). A systematic literature review: Setting a basis for smart and sustainable city performance measurement. *Sustainable Development*, 32(1), 555–573. <https://doi.org/10.1002/sd.2693>
- Kim, N., Kim, G., Shim, S., Jang, S., Song, J., & Lee, B. (2024). Key Technologies for 6G-Enabled Smart Sustainable City. *Electronics (Switzerland)*, 13(2), 1–25. <https://doi.org/10.3390/electronics13020268>
- Kim, P., & Im, T. (2019). Comparing government performance indicators: A fuzzy-set analysis. *Korean Journal of Policy Studies*, 34(2), 1–28. <https://doi.org/10.52372/kjps34201>
- Kusumastuti, R. D., Nurmala, N., Rouli, J., & Herdiansyah, H. (2022). Analyzing the factors that influence the seeking and sharing of information on the smart city digital platform: Empirical evidence from Indonesia. *Technology in Society*, 68(September 2021). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101876>
- Kuswati, Y., Hartati, T., & Kusmayadi, D. (2022). Implementation of E-Government-Based Policies in Improving Public Service Satisfaction in the Majalengka Regency Local Government. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 385–394. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i3.44831>
- Lai, C. M. T., & Cole, A. (2023). Measuring progress of smart cities: Indexing the smart city indices. *Urban Governance*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.11.004>
- Lee, K., Choi, S. O., Kim, J., & Jung, M. (2018). A study on the factors affecting decrease in the government corruption and mediating effects of the development of ICT and E-government-a cross-country analysis. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 4(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/joitmc4030041>
- Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2024). What is the impact of smart city development? Empirical evidence from a Smart City Impact Index. *Urban Governance*, 4(1), 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.11.003>
- Lytras, M. D., & Ţerban, A. C. (2020). E-Government Insights to Smart Cities Research: European Union (EU) Study and the Role of Regulations. *IEEE Access*, 8, 65313–65326. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982737>
- Ma, L., & Zheng, Y. (2018). Does e-government performance actually boost citizen use? Evidence from European countries. *Public Management Review*, 20(10), 1513–1532. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1412117>
- Macke, J., Rubim Sarate, J. A., & de Atayde Moschen, S. (2019). Smart sustainable cities evaluation and sense of community. *Journal of Cleaner Production*, 239. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118103>
- Marizka, M. (2020). Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Analisis Kesiapan Kota Padang Menuju Smart City Melalui Pembangunan Command Center. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, May 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12084.81282>
- Mio, C., Fasan, M., Marcon, C., & Panfilo, S. (2020). The predictive ability of legitimacy and agency theory after the implementation of the EU directive on non-financial information. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2465–2476. <https://doi.org/10.1002/csr.1968>
- Multama, I., Asniati, A., & Rahman, A. (2019). *Analysis the Effect of E-Government Implementation on Quality of Information Towards Government to Government (G2G)*.

- 225(Icobest), 494–502. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288772>
- Nawafleh, S. (2020). The implementation of e-government and the trust of citizens in public sector performance: The mediating role of service quality. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(1), 17–35. <https://doi.org/10.1504/IJPPSPM.2020.105086>
- Pratama, I. S., & Deviyanti, D. R. (2022). Volume . 18 Issue 3 (2022) Pages 540-550 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership pada perusahaan high-profil. *Jebm*, 18(3), 540–550. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11701>
- Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: A systematic literature review. *Cities*, 81(February), 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014>
- Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Shamsuzzoha, A., Niemi, J., Piya, S., & Rutledge, K. (2021). Smart city for sustainable environment: A comparison of participatory strategies from Helsinki, Singapore and London. *Cities*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103194>
- Silva, S. (2021). Corporate contributions to the Sustainable Development Goals: An empirical analysis informed by legitimacy theory. *Journal of Cleaner Production*, 292, 125962. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125962>
- Sun, P. L., Ku, C. Y., & Shih, D. H. (2015). An implementation framework for E-Government 2.0. *Telematics and Informatics*, 32(3), 504–520. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003>
- Sunardi, S., Djazuli, A., Handayani, R. D., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2022). The Role of Human Development in Improving Local Government Performance Through Good Government Governance. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 571–582. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.571-582>
- Supratiwi, W., . I., & Angesti Octorizki, F. (2019). The Role of Good Government Governance on the Influence of E-Government Implementation Toward Local Government Performance. *KnE Social Sciences*, 3(11), 540–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4033>
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., & Saputra, A. (2017). *E-Government , Audit Opini , dan Kinerja Lokal Administrasi Pemerintahan di Indonesia*.
- Wey, W.-M., & Peng, T.-C. (2021). Study on Building a Smart Sustainable City Assessment Framework Using Big Data and Analytic Network Process. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(3). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)up.1943-5444.0000704](https://doi.org/10.1061/(asce)up.1943-5444.0000704)
- Zhang, Jiasheng, Li, H., & Yang, K. (2022). A Meta-Analysis of the Government Performance—Trust Link: Taking Cultural and Methodological Factors into Account. *Public Administration Review*, 82(1), 39–58. <https://doi.org/10.1111/puar.13439>
- Zhang, Junru, Zheng, C., & Shan, Y. G. (2024). What accounts for the effect of sustainability engagement on stock price crash risk during the COVID-19 pandemic—Agency theory or legitimacy theory? *International Review of Financial Analysis*, 93(December 2023), 103167. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103167>